



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.879.500.000**

1. Tanah Seluas 1.168 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000
2. Tanah Seluas 1.934 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 1.895 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 201.000.000
4. Tanah Seluas 2.434 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 205.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **21.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **16.850.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **64.383.743**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.981.733.743

III. HUTANG

Rp. 305.265.522

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.676.468.221

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.